

Implementation of the Smart Indonesia Card Policy at Sman 1 Wonoayu, Sidoarjo Regency

[Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Di Sman 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo]

Dona Amalia Wardana¹⁾, Lailul Mursyidah ^{*.2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Abstract. The purpose of this study is to describe the implementation of the KIP policy at SMAN 1 Wonoayu according to the four factors of Warwic's policy implementation theory. The research method applied is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of this study are the implementation of the KIP program at SMAN 1 Wonoayu seen through Warwic's policy implementation theory, namely (1) organizational capacity, in the form of conducting routine training for staff on KIP procedures, developing staff skills, and implementing good technology and infrastructure for KIP management; (2) information, in the form of verifying KIP recipient data from the central government; (3) support, in the form of receiving support from the Sidoarjo Regency Education Office, namely guidance and technical assistance related to KIP implementation, and involving parents and local communities to support the morale and material of KIP students; and (4) potential distribution, in the form of conducting socialization on disbursement procedures and communicating with related parties.

Keywords - Smart Indonesia Card; SMAN 1 Wonoayu; Policy Implementation

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan KIP di SMAN 1 Wonoayu menurut empat faktor teori implementasi kebijakan Warwic. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini adalah pengimplementasian program KIP di SMAN 1 Wonoayu dilihat melalui teori implementasi kebijakan Warwic, yaitu (1) kemampuan organisasi, berupa mengadakan pelatihan secara rutin untuk staff tentang prosedur KIP, melakukan pengembangan keahlian staff, dan menerapkan teknologi serta infrastruktur yang baik untuk pengelolaan KIP; (2) informasi, berupa melakukan verifikasi data penerima KIP dari pemerintah pusat; (3) dukungan, berupa mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yaitu bimbingan dan bantuan teknis terkait implementasi KIP, serta melibatkan orang tua dan komunitas lokal untuk mendukung moral dan materiil siswa KIP; dan (4) pembagian potensi, berupa melakukan sosialisasi tentang prosedur pencairan dan berkomunikasi dengan pihak terkait.

Kata Kunci - Kartu Indonesia Pintar; SMAN 1 Wonoayu; Implementasi Kebijakan

I. PENDAHULUAN

Banyak program pemerintah tentang pendidikan [1]. Pengimplementasian KIP atau Kartu Indonesia Pintar di Indonesia adalah langkah pemerintah untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa terhambat masalah biaya. Kartu Indonesia Pintar (KIP) sendiri adalah bantuan uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk membantu membiayai pendidikan mereka dan menjadi program kelanjutan dan pengembangan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) [2].

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada dasarnya bertujuan untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan finansial. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian data penerima. Berdasarkan pengamatan di SMAN 1 Wonoayu, terdapat perbedaan penyaluran dana antara tingkat kelas pada siswa kelas Sepuluh tidak menerima bantuan dana, sedangkan siswa kelas

Sebelas mendapatkan Rp800.000 untuk kelas Duabelas Rp900.000 per semester. Hal ini menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam pendataan dan distribusi dana, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut agar tujuan program KIP dapat terlaksana secara merata. Oleh karena itu, akurasi data penerima dan transparansi dalam penyaluran dana menjadi faktor krusial agar implementasi program KIP dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu sebagai bentuk bantuan pendidikan dari pemerintah [3]. Program ini merupakan bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan kepada anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu atau berada dalam kondisi rentan secara ekonomi agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak [4]. Pengertian PIP juga tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan dalam bentuk dana tunai guna mendukung perluasan akses dan kesempatan belajar bagi pelajar dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan secara ekonomi. Melalui KIP, siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK yang berasal dari keluarga miskin memperoleh dukungan biaya pendidikan.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, serta lembaga terkait lainnya yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi penerima manfaat. Proses penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening khusus bagi penerima guna memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan pendidikan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lebih dari 20 juta siswa telah mendapatkan manfaat dari program KIP. Meskipun mekanisme penyaluran telah mengalami banyak perbaikan, tantangan terkait akurasi data dan distribusi yang merata masih menjadi isu penting yang perlu terus diatasi. Selain itu, kendala lain dalam implementasi KIP adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan dan pemanfaatan KIP, serta kesulitan dalam mengakses data yang valid di daerah terpencil atau terisolasi.

Dasar hukum Dasar hukum yang menjadi landasan pengimplementasian KIP yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non-Tunai mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi bantuan pendidikan kepada keluarga kurang mampu, melalui sistem non-tunai yang memudahkan penerima dalam mengakses bantuan secara langsung dan tepat sasaran. Selain itu, Pasal 1 Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, mengemukakan bahwa “Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk bantuan dari pemerintah berupa dana tunai, yang ditujukan untuk memperluas akses dan memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau rentan secara ekonomi, guna mendukung pembiayaan pendidikan mereka” [5]. Program KIP juga tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, yang mengemukakan bahwa PIP atau yang sekarang disebut KIP memiliki tujuan dalam pembuatannya untuk pendidikan dasar dan menengah, yaitu (1) meningkatkan akses pendidikan bagi anak usia 6 hingga 21 tahun, agar mereka menyelesaikan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; (2) mencegah siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan karena kesulitan ekonomi; dan (3) menarik kembali siswa yang putus sekolah atau tidak melanjutkan untuk kembali mendapatkan layanan pendidikan di berbagai lembaga pendidikan nonformal [6].

Dari banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam pengimplementasian KIP di Indonesia, terdapat beberapa SD, SMP, dan SMA/SMK yang dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan program ini sesuai dengan SOP yang berlaku dari pemerintah. Namun, meskipun sejumlah sekolah sudah berhasil dalam penerapannya, keberhasilan tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya optimal, karena permasalahan implementasi KIP hingga saat ini masih menjadi tantangan yang terus dicari jalan penyelesaiannya. Salah satu contoh keberhasilan implementasi KIP dapat ditemukan di SMA Sultan Iskandar Muda Kota Medan. Di sekolah ini, pelaksanaan KIP berjalan dengan cukup baik, dengan memenuhi 5 dari 6 indikator implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter, yang mencakup standar dan sasaran kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, SOP, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Faktor penghambat utamanya adalah keterbatasan sarana dan prasarana, terutama karena tidak adanya ruang khusus untuk pelaksanaan program KIP secara maksimal. Namun, meskipun sekolah ini telah mencapai banyak hal dalam implementasi KIP, mereka tetap menghadapi sejumlah masalah yang juga dialami oleh sekolah lain di Indonesia, yaitu ketidakakuratan dalam penyaluran KIP. Pihak sekolah terus berupaya untuk memperbaiki masalah ini dengan melakukan inovasi dan perbaikan dalam proses seleksi, serta memperketat pengawasan terhadap distribusi KIP [7]. Selain itu, adapun sekolah lain yang dapat dikatakan berhasil dalam pengimplementasian KIP, namun masih menemui beberapa kendala, yaitu SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Setelah dievaluasi, pelaksanaan kebijakan di SMA Negeri 4 Kota Cirebon terbukti cukup efektif karena tujuan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah berhasil tercapai. Tujuan tersebut meliputi mengurangi kendala yang dihadapi siswa dari keluarga kurang mampu dalam mengakses pendidikan, mencegah terjadinya putus sekolah

akibat masalah biaya, serta memberikan dukungan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan dalam proses pembelajaran. Namun, tetap terdapat beberapa masalah, yaitu salah satunya dana yang diterima siswa tidak selalu digunakan dengan tepat, sehingga menambah beban orang tua, terutama dalam biaya sekolah. Distribusi BSM melalui KIP juga belum merata, dengan beberapa sekolah yang seharusnya mendapat alokasi bantuan tidak menerima dana yang cukup. Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan BSM melalui KIP di sekolah ini masih belum optimal, meski prosedur operasional standar (SOP) sudah dijalankan dengan baik [8].

Contoh lain pengimplementasian KIP di Indonesia dapat dilihat pada SMP N 1 Poncowarno, Kebumen, Jawa Tengah. Pelaksanaan Program KIP di sekolah ini sudah berjalan dengan baik melalui sosialisasi rutin dan fasilitas pendukung seperti komputer dan wi-fi, meskipun jumlah pengelola masih terbatas. Sekolah bertanggung jawab dalam mendistribusikan bantuan kepada siswa yang berhak, namun program ini belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi angka putus sekolah. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya tenaga pengelola, ketepatan sasaran distribusi, dan kelalaian siswa dalam memanfaatkan bantuan, sekolah terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas program ini [9].

Penelitian ini memilih salah satu SMA di Jawa Timur yang telah mengimplementasikan KIP, yaitu SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo. Sekolah ini telah berhasil mengimplementasikan Program KIP dengan tujuan untuk menolong meringankan mengakses pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini dijalankan dengan cukup baik di sekolah ini, dengan pelatihan SDM dilakukan secara rutin untuk memastikan para siswa dan orang tua memahami mekanisme penggunaan KIP. Fasilitas yang ada, seperti komputer dan akses internet, mendukung kelancaran proses verifikasi data dan pencairan dana KIP, serta sekolah juga berperan aktif dalam mendata siswa yang berhak menerima bantuan. Namun, sekolah ini juga menghadapi beberapa masalah terkait implementasi KIP, salah satunya adalah ketidakupayaan sasaran dalam penyaluran dana.

Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian data dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dengan instansi terkait dalam hal verifikasi dan pemutakhiran data penerima. Ketidakupayaan sasaran ini mengakibatkan beberapa siswa yang membutuhkan bantuan pendidikan menjadi tidak terjangkau oleh program KIP, sementara sumber daya yang tersedia digunakan oleh mereka yang tidak membutuhkan. Selain masalah ketidakupayaan sasaran, penyaluran dana KIP di SMAN 1 Wonoayu juga sering mengalami keterlambatan yang dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk lebih memahami sejauh mana program ini dilaksanakan di SMAN 1 Wonoayu, berikut ini disajikan tabel data jumlah siswa penerima KIP di SMAN 1 Wonoayu.

Tabel 1
Data Jumlah Siswa Penerima KIP di SMAN 1 Wonoayu

| Tahun | Kelas | Siswa yang mengajukan KIP | Siswa yang menerima KIP |
|-------|-------|---------------------------|-------------------------|
| 2022 | 11 | 82 | 53 |
| 2022 | 12 | 82 | 50 |
| 2023 | 11 | 107 | 72 |
| 2023 | 12 | 107 | 90 |
| 2024 | 11 | 48 | 45 |
| 2024 | 12 | 48 | 40 |

Sumber: Diolah dari SMAN 1 Wonoayu 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Siswa Kelas 10 dari SMAN 1 Wonoayu seharusnya menerima bantuan KIP setiap tahun dengan jadwal pencairan yang telah ditetapkan. Namun, Siswa hanya menerima bantuan dua kali dalam tiga tahun, Terdapat beberapa siswa yang seharusnya mendapat bantuan tersebut, ada siswa yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap menerima bantuan KIP. Karena ketidak akuratan ini distribusi bantuan menjadi tidak adil dan siswa yang paling membutuhkan tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima bantuan. Tekait permasalahan lain ada masalah dengan pencairan dana KIP sering kali menjadi keluhan para siswa. Salah satu penyebab utama keterlambatan ini adalah kurangnya sosialisasi dan pemahaman tentang prosedur pencairan dana oleh sekolah dan pemerintah, sehingga banyak siswa atau orang tua tidak tahu proses waktu atau cara pencairan dana yang tepat. Kelemahan ini akan berdampak pada program dalam mencapai tujuannya untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan dalam pendataan dan sosialisasi terkait pencairan dana KIP agar program ini dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi siswa yang membutuhkan.

Permasalahan terkait keterlambatan pencairan dana dari info Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun 2023 yang seharusnya dicairkan pada akhir bulan Juni namun seringkali baru disalurkan

kepada siswa pada bulan September hingga Desember, pada keterlambatan pencairan dana di Tahun 2024 hanya mengalami keterlambatan selama satu bulan ini yang menjadi salah satu keluhan utama dalam pelaksanaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Keterlambatan ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan bagi siswa Salah satu penyebab keterlambatan pencairan dana ini terletak pada kurangnya sosialisasi terkait proses pencairan yang jelas. Baik di tingkat kementerian, sekolah, maupun siswa sendiri, banyak yang masih menghadapi kebingungan tentang alur dan prosedur pencairan dana yang seharusnya diikuti. Minimnya informasi yang disampaikan kepada siswa dan orang tua tentang kapan tepatnya dana akan dicairkan dan apa yang harus mereka lakukan untuk mempercepat prosesnya Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya perbaikan dalam komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran dana KIP. Sosialisasi yang lebih intensif dan terarah, serta kejelasan mengenai alur pencairan dana, sangat diperlukan agar siswa dan orang tua dapat memahami dengan baik prosedur yang harus dilakukan.

Implementasi kebijakan merupakan jembatan antara keputusan kebijakan dan hasil kebijakan [10]. Keberhasilannya tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh proses pelaksanaannya [11]. Implementasi yang baik dapat menghasilkan dampak positif sesuai dengan tujuan kebijakan, sedangkan implementasi yang buruk dapat mengakibatkan kegagalan meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik [12]. Implementasi kebijakan program di sektor publik menunjukkan berbagai dinamika yang menarik [13]. Beberapa kebijakan berhasil diimplementasikan dengan baik karena adanya koordinasi yang efektif antar lembaga, dukungan sumber daya yang memadai, serta partisipasi aktif masyarakat [14]. Misalnya, program kesehatan masyarakat berbasis komunitas sering kali berhasil karena melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Penelitian terdahulu sangat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai referensi karena dapat membantu dalam menemukan instrumen yang telah tervalidasi untuk mengisi kekosongan yang ditemukan pada penelitian sebelumnya [15]. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang membahas tentang implementasi KIP dengan permasalahannya masingmasing. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk, tahun 2022 berjudul “Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penerima beasiswa KIP-Kuliah di Universitas Diponegoro sering merasa kurang memperoleh informasi yang jelas dan mendalam dari pihak pengelola kampus, sehingga mereka menghadapi beberapa masalah, seperti terbatasnya transparansi informasi, ketidaksesuaian jadwal pencairan dana, serta proses birokrasi yang berlapis [16].

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian oleh Harlina, dkk, tahun 2023 berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kip Kuliah Tahun 2022 (Studi Di Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh Bengkulu)”, juga mengungkapkan bahwa KIP masih salah sasaran dimana beberapa mahasiswa penerima bantuan KIP Kuliah yang menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti mengikuti pola hidup konsumtif atau hedonis. Selain itu, terdapat pula penerima KIP Kuliah yang secara ekonomi tergolong mampu, namun memperoleh bantuan melalui jalur tidak resmi atau koneksi orang dalam. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program KIP Kuliah belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan [17].

Selain itu, penelitian oleh Jumanah dan Rosita tahun 2022 berjudul “Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan”, juga menekankan bahwa pelaksanaan KIP masih menghadapi sejumlah masalah, seperti ketidakakuratan dalam penentuan calon penerima Program Indonesia Pintar, masih adanya keterlambatan dalam pencairan dana, kurangnya sosialisasi program, lamanya proses verifikasi kepemilikan kartu, serta rendahnya kesadaran orang tua terhadap tujuan bantuan Program Indonesia Pintar, yang mengakibatkan pengimplementasian KIP (Kartu Indonesia Pintar) belum mencapai hasil yang maksimal [18].

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa pengimplementasian program Kartu Indonesia Pintar (KIP) masih belum tersalurkan secara optimal. Hal tersebut serupa dengan pengimplementasian KIP di SMAN 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang juga menghadapi beberapa tantangan dan permasalahan, yaitu **pertama**, data penerima KIP yang kurang akurat. Kurangnya keakuratan data penerima KIP menyebabkan beberapa siswa yang berhak mendapatkan KIP justru tidak terdaftar dan tidak mendapatkan KIP. Namun sebaliknya, beberapa siswa yang seharusnya tidak mendapatkan KIP karena tidak memenuhi syarat penerima KIP, justru terdaftar dan mendapatkan bantuan. **Kedua**, pencairan dana KIP yang sering mengalami keterlambatan. Keterlambatan dalam penyaluran dana KIP ke rekening masing-masing siswa menyebabkan timbulnya banyak keluhan dari penerima KIP. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi yang jelas dalam proses pencairan dana KIP kepada siswa, baik di tingkat kementerian, sekolah, maupun siswa sendiri.

Berdasarkan observasi masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut sebagai hasil penelitian menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Warwick Tahir sebagai landasan untuk mendeskripsikan secara rinci bagaimana implementasi kebijakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo karena dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Teori Implementasi Kebijakan Warwick terbagi menjadi empat faktor, yaitu (1) **kemampuan organisasi**, faktor ini mengacu pada kapasitas internal organisasi yang melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, keahlian, teknologi, dan

infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan secara efektif; (2) **informasi**, elemen kunci dalam proses implementasi kebijakan yang mencakup data dan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan, termasuk tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan; (3) **dukungan**, faktor ini mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan lembaga terkait yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program; dan (4) **pembagian potensi**, faktor ini merujuk pada alokasi sumber daya dan tanggung jawab di antara berbagai aktor atau instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Pembagian harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak agar proses implementasi dapat berjalan secara efektif dan efisien [19].

II. METODE

Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna membedah data penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti melalui pengamatan, dengan cara menggambarkan kondisi objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sesuai dengan kenyataan [20]. Selain itu, penelitian deskriptif kualitatif juga diartikan sebagai penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep yang diteliti, bukan pada data numerik atau statistik sehingga penelitian ini lebih menekankan pada eksplorasi empiris dan pemahaman fenomena yang sedang dianalisis [21]. Dengan menggunakan metode tersebut, dimaksudkan untuk mengetahui pengimplementasian KIP di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak serta melihat kendala apa saja yang terjadi dalam pengimplementasianya. Lokasi penelitian ini berada di SMAN 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini terbagi menjadi tiga metode, yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Data primer atau data utama penelitian ini berupa hasil wawancara langsung dengan informan, yaitu Kepala Sekolah SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo dan Koordinator KIP SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo. Selain itu, terdapat data sekunder penelitian ini yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi program KIP di SMAN 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Warwick yang terbagi menjadi empat faktor, yaitu kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi [19].

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Miles & Huberman. Teknik analisis Miles & Huberman terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data baik data primer maupun data sekunder yang diperoleh selama penelitian agar lebih relevan dan terfokus untuk memudahkan tahap analisis selanjutnya. Penyajian data adalah tahap menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang mudah dipahami untuk mempermudah pemahaman dalam menarik kesimpulan. Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data yang telah dikumpulkan dengan cara menguji konsistensi, ketepatan, dan keterkaitan antar temuan dalam penelitian. Tahapan analisis data penelitian ini, yaitu (1) wawancara dengan informan, observasi lapangan, dan dokumentasi berupa foto untuk mengumpulkan data; (2) memilah data yang sudah terkumpul untuk mengetahui pengimplementasian kebijakan program KIP di SMAN 1 Wonoayu yang sesuai dengan empat faktor teori Implementasi Kebijakan Warwick; (3) mengelola datadata penelitian yang telah dipilah dengan teori Implementasi Kebijakan Warwick yang terbagi menjadi empat faktor untuk selanjutnya diambil kesimpulan; (4) penarikan kesimpulan dari data yang sudah dikelola tentang pengimplementasian kebijakan program KIP di SMAN 1 Wonoayu yang sesuai dengan empat faktor teori Implementasi Kebijakan Warwick; dan (5) menyajikan laporan hasil penelitian [22].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Indonesia hingga saat ini belum diimplementasikan secara optimal. Bantuan yang diberikan melalui program ini ditujukan untuk membuka akses pendidikan bagi seluruh warga Indonesia. Secara keseluruhan, program ini memiliki tujuan yang baik, yaitu memberikan dukungan kepada peserta didik yang membutuhkan [4]. KIP masih memiliki persyaratan yang tergolong rumit dan proses pencairannya juga terbilang lambat. Di sisi lain, keberadaan KIP memberikan dukungan yang signifikan bagi para penerimanya, yang berdampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik mereka [23]. Implementasi KIP di SMAN 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo juga sudah dijalankan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengimplementasian KIP tersebut kepada para siswa yang menerimanya dan akan dianalisis menggunakan teori Implementasi Kebijakan Warwick Tahir, sebagai berikut.

Kemampuan Organisasi

Menurut Warwick, kemampuan organisasi mengacu pada kapasitas internal organisasi yang melaksanakan kebijakan, termasuk sumber daya manusia, keahlian, teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

kebijakan secara efektif [19]. Kemampuan organisasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan, termasuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo. Kemampuan organisasi mengacu pada kapasitas internal sekolah untuk menjalankan program KIP secara efektif, seperti pengelolaan SDM, penguasaan keahlian yang relevan, pemanfaatan teknologi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program KIP adalah keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, yang mampu memahami kebijakan dengan baik [24]. Selain itu, untuk memperkuat kemampuan organisasi dalam melaksanakan Program KIP di SMAN 1 Wonoayu, sangat diperlukan pendekatan strategis yang mencakup pengembangan pelatihan berkala bagi tenaga pengajar dan staf, peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung, serta pembentukan tim kerja yang solid dan kolaboratif. Kepala Sekolah SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo, Ibu Ririn Faridah, menyatakan bahwa:

"Tenaga pengajar dan staf administrasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang KIP sangat penting. Kami secara rutin mengadakan pelatihan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tujuan dan prosedur KIP dengan baik.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia di SMAN 1 Wonoayu sudah dapat dikatakan mumpuni dan menjadi langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan program. Selain itu, keahlian yang dimiliki oleh staf sekolah berperan penting dalam menentukan efektivitas program KIP. Keahlian ini mencakup pengetahuan tentang kebijakan pendidikan, manajemen keuangan, serta kemampuan dalam mendampingi siswa. Koordinator KIP SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo, Bapak M. Zukhrifal Fuadi, menambahkan:

"Kami perlu memiliki staf yang tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga dapat memberikan bimbingan kepada siswa tentang cara memanfaatkan KIP dengan baik." (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Dengan demikian, peningkatan keahlian para pengelola dan pendidik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap program ini. Teknologi juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi KIP, di mana penggunaan sistem informasi yang efisien untuk mengelola data penerima KIP sangat diperlukan untuk memastikan proses pencairan dana berjalan lancar. Dengan teknologi yang tepat, pengelolaan data dan komunikasi antar pihak terkait dapat ditingkatkan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dapat terjaga. Selanjutnya, sekolah ini memiliki fasilitas yang cukup baik, termasuk ruang kelas yang nyaman dan akses ke sumber belajar. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas yang memadai merupakan bagian integral dalam mendukung keberhasilan program. Kemampuan organisasi di SMAN 1 Wonoayu dalam mengimplementasikan Program Kartu Indonesia Pintar sangat tergantung pada pengelolaan sumber daya manusia, penguasaan keahlian, pemanfaatan teknologi, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Melalui pelatihan yang rutin, pengembangan keahlian staf, serta dukungan teknologi dan infrastruktur yang baik, sekolah ini berupaya memastikan bahwa tujuan KIP tercapai, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa di daerah tersebut.

Informasi

Menurut Warwick, informasi adalah elemen kunci dalam proses implementasi kebijakan yang mencakup data dan pengetahuan yang relevan tentang kebijakan, termasuk tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, serta hasil yang diharapkan [19]. Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif selama implementasi. Informasi dalam proses implementasi kebijakan program KIP di SMAN 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo mengalami hambatan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketidakakuratan data penerima KIP, dimana siswa yang berhak tidak menerima dana KIP, sementara yang tidak layak justru mendapatkan dana KIP. Ketidakakuratan data penerima KIP dapat menyebabkan tujuan dari pemberian KIP tidak berjalan dengan semestinya dan memungkinkan adanya permasalahan dikemudian hari baik internal maupun eksternal. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pendaftaran dan penerimaan KIP di SMAN 1 Wonoayu dibawah ini.

Tabel 2
Data Jumlah Siswa Penerima KIP di SMAN 1 Wonoayu Tahun 2023-2024

| Tahun | Siswa yang mengajukan KIP | Siswa yang menerima KIP |
|-------|---------------------------|-------------------------|
| 2023 | 214 | 162 |
| 2024 | 96 | 85 |

Sumber: Diolah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2024

Berdasarkan data penerimaan KIP di SMAN 1 Wonoayu dari informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di atas, dapat dilihat pada tahun 2023, SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo mencatat bahwa 2023 dari 214 siswa yang mengajukan KIP, hanya 162 siswa yang diterima, sedangkan di tahun 2024 dari 96 siswa yang mengajukan hanya 85 siswa yang diterima, menunjukkan adanya ketidakakuratan dalam data pengajuan dan penerimaan KIP. Kepala Sekolah SMAN 1 Wonoayu, Ibu Ririn Faridah, mengungkapkan:

"Kami sering mendapati bahwa data penerima KIP yang kami terima tidak sepenuhnya akurat. Beberapa siswa yang seharusnya mendapatkan KIP tidak terdaftar, sementara ada juga yang tidak layak tetapi tetap menerima.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Situasi ini menunjukkan bahwa informasi yang tidak akurat dapat menghambat akses pendidikan yang seharusnya diberikan kepada siswa yang membutuhkan, dan berpotensi merugikan mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan. Menurut Martins & Toletina, seiring berjalananya waktu, beberapa fenomena serupa menunjukkan adanya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penyaluran dana KIP ini, yang mengindikasikan bahwa penentuan sasaran penerima tidak selalu sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan berdasarkan tujuan program [25]. Lebih lanjut, masalah dalam pengumpulan data juga berpengaruh pada ketidakakuratan informasi. Bapak M. Zukhrifal Fuadi, koordinator KIP SMAN 1 Wonoayu, menjelaskan:

"Proses verifikasi data penerima KIP seringkali terganggu karena kurangnya sumber daya untuk melakukan peninjauan lapangan. Kami mengandalkan data yang dikirim dari pemerintah, yang kadang tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan yang memadai untuk mengumpulkan dan memverifikasi data, kualitas informasi yang digunakan dalam implementasi KIP akan terpengaruh. Situasi ini tidak hanya menghambat tujuan program, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan siswa dan orang tua yang merasa dirugikan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana KIP sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, dimana dana KIP seharusnya digunakan untuk kegiatan pendidikan dan tidak dialokasikan untuk keperluan yang tidak terkait dengan pendidikan. Secara umum, sekolah menghadapi tantangan dalam hal pertanggungjawaban penggunaan dana KIP [26]. Ibu Ririn Faridah, menambahkan:

"Ketika kami tidak memiliki informasi yang akurat, kami menghadapi kesulitan dalam menentukan prioritas bantuan. Akibatnya, beberapa siswa yang sangat membutuhkan bantuan malah terabaikan.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan sistem pengumpulan dan manajemen data. Penguatan mekanisme verifikasi data dan keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat membantu meningkatkan akurasi data penerima KIP, sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penting untuk memastikan bahwa setiap siswa yang benar-benar membutuhkan tidak hanya terdaftar, tetapi juga terpantau secara berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara adil dan tepat sasaran. Sehingga, masalah informasi dalam implementasi program Kartu Indonesia Pintar di SMAN 1 Wonoayu menunjukkan betapa pentingnya akurasi data untuk kesuksesan program. Ketidakakuratan informasi tidak hanya mengganggu penyaluran bantuan, tetapi juga dapat berdampak negatif pada siswa yang seharusnya mendapatkan dukungan.

Dukungan

Dukungan dari berbagai pihak menjadi elemen krusial dalam realisasi kebijakan, termasuk Program KIP di SMAN 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Menurut teori implementasi kebijakan Warwick, dukungan mencakup keterlibatan para pemangku kepentingan, masyarakat, dan lembaga terkait yang berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program [19]. Tanpa dukungan yang utuh, efektivitas program KIP dapat terhambat, dan manfaat yang diharapkan bagi siswa tidak akan tercapai secara optimal. Namun, dukungan implementasi KIP di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo sudah dapat dikatakan tidak terjadi hambatan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan Program KIP di SMAN 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, sangatlah penting untuk terus memperkuat sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, instansi pendidikan, serta masyarakat, agar mereka dapat berkolaborasi secara efektif dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang mendukung, sehingga setiap elemen dari implementasi program dapat berjalan lancar tanpa hambatan, dan siswa dapat merasakan manfaat secara maksimal. Kepala Sekolah SMAN 1 Wonoayu, Ibu Ririn Faridah, menjelaskan:

"Kami sangat beruntung mendapatkan dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Mereka sering memberikan bimbingan dan bantuan teknis terkait implementasi KIP.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Dukungan ini tidak hanya membantu sekolah dalam memahami kebijakan, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program secara efektif. Selain itu, dukungan dari masyarakat juga berkontribusi pada keberhasilan KIP. Masyarakat yang peduli terhadap pendidikan sering kali memberikan dukungan moral dan materiil bagi siswa yang menerima KIP. Bapak M. Zukhrifal Fuadi, Koordinator KIP SMAN 1 Wonoayu, menekankan bahwa:

"Kami aktif melibatkan orang tua siswa dan komunitas lokal untuk menyukseskan program ini. Dengan dukungan mereka, siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung bagi para siswa. Lembaga-lembaga terkait juga memainkan peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan sumber daya. Komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan Dinas Pendidikan ataupun pihak lain yang bersangkutan juga berperan penting dalam kelancaran program ini [24]. Selain itu, dukungan dari sektor swasta juga tidak kalah penting. Beberapa perusahaan di daerah Sidoarjo memberikan sponsor untuk

kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan siswa. Keterlibatan sektor swasta dalam pendidikan membantu menciptakan sinergi antara dunia pendidikan dan industri, yang penting untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Secara keseluruhan, dukungan dari berbagai pihak, baik pemangku kepentingan, masyarakat, lembaga terkait, maupun sektor swasta, sangat berpengaruh terhadap implementasi Program KIP di SMAN 1 Wonoayu. Melalui kolaborasi yang baik, program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi merujuk pada alokasi sumber daya dan tanggung jawab di antara berbagai aktor atau instansi yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Warwick mengemukakan bahwa pembagian harus dilakukan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak agar proses implementasi dapat berjalan secara efektif dan efisien [19]. Pembagian potensi dalam implementasi kebijakan Program KIP di SMAN 1 Wonoayu mencakup alokasi sumber daya dan tanggung jawab di antara berbagai pihak yang terlibat, termasuk sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terdapat masalah terkait keterlambatan pencairan dana KIP yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pencairan. Informasi yang didapat penulis dari pihak sekolah tentang penetapan jumlah penerima KIP setiap jenjang kelas persemesternya, yaitu untuk kelas 10 masih belum mendapat KIP sedangkan kelas 11 mendapat Rp 900.000 dan kelas 12 mendapat Rp 1.000.000 persemester.

Hal ini mengakibatkan lonjakan keluhan dari penerima KIP yang merasa dirugikan. Salah satu kendala utama dalam pencairan dana KIP adalah kurangnya pemahaman tentang proses yang harus dilalui. Ketidakjelasan informasi ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan penerima, yang seharusnya menerima dukungan tepat waktu untuk kebutuhan pendidikan mereka. Sebenarnya, dengan adanya pemberian informasi yang akurat, motivasi, dan pendampingan dalam pendaftaran Program KIP-K, terdapat hubungan yang positif dengan meningkatnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi [27]. Kepala Sekolah SMAN 1 Wonoayu, Ibu Ririn Faridah, menjelaskan bahwa:

"Banyak orang tua siswa yang tidak memahami prosedur pencairan KIP, sehingga mereka bingung ketika dana terlambat turun. Sosialisasi yang kurang memadai membuat mereka merasa tidak diperhatikan.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan ini. Bapak M. Zukhrifal Fuadi, koordinator KIP SMAN 1 Wonoayu, juga angkat bicara perihal masalah ini:

"Kami sering kali mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pencairan dana. Ketidakjelasan dalam alur komunikasi ini menyebabkan keterlambatan yang berulang.", (wawancara pada tanggal 24 Oktober 2024).

Situasi ini menunjukkan bahwa pembagian tanggung jawab yang tidak jelas dapat menghambat proses implementasi KIP, sehingga dampak positif yang diharapkan dari program ini tidak tercapai secara maksimal. Tanpa dukungan yang memadai, baik dari segi tenaga kerja maupun informasi, proses pencairan dana menjadi terhambat, yang berdampak pada keluhan yang semakin meningkat dari siswa dan orang tua. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan meningkatkan sosialisasi dan komunikasi antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

Tabel 3
Permasalahan dalam Implementasi KIP di SMAN 1 Wonoayu Sidoarjo

| Aspek | Masalah | Dampak | Solusi |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Akurasi Data Penerima | Data penerima KIP tidak akurat, beberapa penerima tidak layak | Siswa yang berhak tidak mendapatkan bantuan | Penguatan sistem verifikasi data dan pengumpulan informasi |
| Sosialisasi | Kurangnya sosialisasi tentang proses pencairan KIP | Kebingungan kalangan orang tua siswa | Mengadakan pertemuan rutin dan penyuluhan kepada masyarakat |
| Koordinasi Antara Instansi | Kurangnya koordinasi antara sekolah dan instansi terkait | Keterlambatan dalam proses pencairan dana | Memperjelas alur komunikasi dan tanggung jawab setiap pihak |

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dukungan Sumber Daya | Keterbatasan sumber daya untuk mendukung pengawasan | Terhambatnya proses pencairan dana dan pengelolaan KIP | Alokasi sumber daya manusia yang memadai untuk pengawasan |
| Pengelolaan Dana | Keterlambatan pencairan dana KIP | Penerima merasa dirugikan dan mengajukan keluhan | Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana |

Sumber: Diolah dari penulis 2024

IV. SIMPULAN

Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMAN 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan akurasi data penerima dan keterlambatan dalam proses pencairan dana. Ketidakakuratan data sering kali menyebabkan siswa yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat malah menerima manfaat. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan data yang lebih baik serta sistem verifikasi yang efektif untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam proses pencairan adalah akurat dan relevan. Selain itu, keterlambatan dalam pencairan dana KIP juga menjadi masalah serius yang merugikan penerima. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pencairan dan ketidakjelasan komunikasi antara instansi terkait menyebabkan banyak orang tua siswa merasa bingung dan frustrasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan dalam sosialisasi yang menyeluruh, termasuk penyuluhan kepada masyarakat dan pengadaan pertemuan rutin antara pihak sekolah, pemerintah, dan orang tua siswa untuk menjelaskan proses dan kendala yang ada. Sebagai solusi, penguatan sistem pengumpulan dan verifikasi data, serta peningkatan komunikasi antara semua pihak yang terlibat, sangatlah penting. Sekolah harus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan KIP. Diharapkan dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan KIP dapat berjalan lebih efektif, memberikan manfaat maksimal bagi siswa yang membutuhkan, dan mengurangi keluhan terkait dengan pencairan dana yang terlambat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Ibu Lailul Mursyidah, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, dukungan, serta saran-saran berharga selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Ucapan terima kasih juga saya tujuhan kepada diri sendiri atas keteguhan hati, kerja keras, dan usaha yang telah dilakukan selama proses ini, meskipun menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada mama saya, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan tanpa henti, baik secara moral maupun material. Tak lupa, rasa terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang telah memberikan semangat, ide, serta bantuan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Selain itu, saya juga menghaturkan terima kasih kepada pihak SMAN 1 Wonoayu yang secara langsung telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.

REFERENSI

- [1] Trisnawati, Liza, A. Syamsuadi, S. Hartati, and I. Reskiyanti, "Koordinasi Pemerintah Dan Swasta Dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement Di Kabupaten Pelalawan," *J. Gov. Local Polit.*, vol. 3, no. 2, pp. 115–23, 2021.
- [2] N. Rahayu and D. Syahputra, "Penentuan Penerima Kartu Indonesia Pintar (Kip) Tahun 2017/2018 Di Sma Negeri 03 Bengkulu Selatan Menggunakan Algoritma Weighted Product," *J. Sci. Soc. Res.*, vol. 5, no. 2, p. 381, 2022, doi: 10.54314/jssr.v5i2.941.
- [3] I. D. Ardianty, S. Febriyanto, R. A. C. D. A. Putri, A. P. R. Cahyani, and M. Djasuli, "Penyalahgunaan Dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Di Indonesia," *Coll. Stud. J.*, vol. 7, no. 1, pp. 28–36, 2024.
- [4] A. S. Gutama, M. Fedryansyah, and E. Nuriyah, "Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (Kip) Berdasarkan Basis Nilai Keadilan Dalam Kebijakan Sosial," *J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 3, p. 389, 2022, doi: 10.24198/jppm.v2i3.35872.

- [5] Persesjen, "Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah," [puslapdik.kemendikbud.go.id](https://puslapdik.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Persesjen-Kemdikbudristek-nomor-14-tahun-2022-tentang-Juklak-PIP-Dikdasmen.pdf), 2022. <https://puslapdik.kemendikbud.go.id/wp-content/uploads/2023/01/Persesjen-Kemdikbudristek-nomor-14-tahun-2022-tentang-J> (accessed Nov. 20, 2024).
- [6] Permendikbud, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar," [peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020), 2020. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/163716/permendikbud-no-10-tahun-2020> (accessed Nov. 20, 2024).
- [7] M. Akbar, "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Pada Sma Sultan Iskandar Muda Kota Medan," repository.uma.ac.id, Medan, 2023.
- [8] I. R. Nahdiyyah, "Evaluasi Kebijakan Bantuan Siswa Miskin Melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) (Studi Kasus Di SMA Negeri 4 Kota Cirebon)," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, pp. 7300–7312, 2023, [Online]. Available: <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5713%0Ahttp://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/5713/4029>.
- [9] V. A. Saputri, "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar (Kip) Dalam Upaya Mengurangi Anak Putus Sekolah Di Smp N 1 Poncowarno," *Spektrum Anal. Kebijak. Pendidik.*, vol. 10, no. 1, pp. 99–111, 2021, doi: 10.21831/sakp.v10i1.17349.
- [10] Syamsuadi *et al.*, "Kebijakan Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Pemberdayaan Desa Wisata Digital Sadar Bencana (DWDSB) Di Riau," *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 3, no. 6, pp. 8436–50, 2023.
- [11] Arisandi, Diki, A. Syamsuadi, and L. Trisnawati., "POLICY BRIEF-MODEL KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI KABUPATEN SIAK," 2023.
- [12] Syamsuadi, Amir, H. Sepriyani, S. Endrini, and A. Febriani, "Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Abdurrah Pada Program Magang Mahasiswa," *EDUKATIF J. ILMU Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 1341–48, 2022.
- [13] Trisnawati, Liza, A. Syamsuadi, D. Arisandi, L. Elvitaria, and S. Hartati, "Strategi Peningkatan Ekonomi Melalui Kebijakan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru Berbasis Digital," *Al-Amwal*, vol. 12, no. 1, pp. 1–12, 2023.
- [14] F. A. Syahrier, "DINAMIKA KEBIJAKAN LAND CONVERSION DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK," *JDPJURNAL Din. Pemerintah.*, vol. 5, no. 1, pp. 18–36, 2022.
- [15] M. Ridwan, A. M. Suhar, B. Ulum, and F. Muhammad, "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *J. Masohi*, vol. 2, no. 1, pp. 42–51, 2021.
- [16] A. D. Larasati, D. Dinda, N. A. Aidah, R. Gustiputri, and S. N. R. Isyak, "Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro," *J. Ilmu Adm. Dan Stud. Kebijak.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–22, 2022.
- [17] E. Harlina, H. Purnawan, and E. W. Suri, "Evaluasi Pelaksanaan Kip Kuliah Tahun 2022 (Studi Di Universitas Prof. Dr. Hazairin, Sh Bengkulu)," *Masy. Demokrasi-Jurnal Ilm. Adm. Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 27–34, 2023.
- [18] J. Jumanah and H. Rosita, "EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDIDIKAN," *Indones. J. Public Adm.*, vol. 8, no. 2, pp. 72–84, 2022.
- [19] A. Tahir, *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Cetakan Ke. Bandung: ALFABETA, 2015.
- [20] D. Amrizal, D. F. Nasution, and A. Amran, "Efektivitas Pelayanan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Balai," *J. SOMASI (Sosial Hum. Komunikasi)*, vol. 1, no. 1, pp. 11–20, 2020, doi: 10.53695/js.v1i1.27.
- [21] M. Ahmadi, S. D. Ardianti, and I. A. Pratiwi, "Nilai Pendidikan Karakter Dalam Cerita Rakyat Sendang Widodari Kabupaten Kudus," *Prog. Pendidik.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–6, 2021, doi: 10.29303/prospek.v2i1.55.
- [22] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis Edition 3*. California: SAGE Publications, 2014.
- [23] A. Amin, R. N. Sasongko, and A. Yuneti, "Kebijakan Kartu Indonesia Pintar untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu," *J. Adm. Educ. Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 98–107, 2022.
- [24] D. Astuti, D. Febriyanti, and M. Q. Kariem, "Evaluasi Kebijakan Program Kartu Indonesia Pintar (Pip) Di Kelurahan Tuan Kentang Tahun 2020," *TheJournalish Soc. Govverment*, vol. 4, no. 3, pp. 249–256, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.435>.
- [25] Martins, E. Kamali, and N. T. Toletina, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia," *Prof. J. Komun. dan Adm. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 331–40, 2024, doi: doi:10.37676/professional.v11i1.6166.
- [26] H. I. Hartini, J. Copriady, and Suarman, "Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMP di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir," *Instr. Dev. J.*, vol. 5, no. 2, pp. 159–163, 2022.
- [27] E. Purnawati, P. Pribadi, I. Alan Nugroho, and A. Yahya Syafa, "Pendampingan Program KIP-K (Kartu

Indonesia Pintar Kuliah) di Masa Pandemi Covid-19,” *J. Pengabdi. Mitra Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–15, 2022.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.